

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hak dan Kewajiban terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, pihak, yang kemudian menjadi dasar pembuatan akta autentik. Perlu dikaji dan dianalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu serta mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu.

Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma. Hasil penelitian menunjukkan ada tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu para pihak hal tersebut karena rahasia jabatan notaris yang melahirkan hak dan kewajiban ingkar, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta yang dibuat olehnya berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya dalam suatu perbuatan hukum jika secara sengaja atau lalai, notaris membuat akta palsu sehingga merugikan pihak lain. Pertanggungjawaban secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana; memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Pertanggungjawaban pidana notaris perlu diatur dalam UUJN yang akan datang.

Kata Kunci: Rahasia Jabatan Notaris, Pertanggungjawaban Pidana, Hak dan Kewajiban Ingkar.

ABSTRACT

This study aims to identify and understand the rights and obligations of the notary position in the criminal case settlement process, which then becomes the basis for making an authentic deed. It is necessary to study and analyze the criminal liability of a notary for a deed made based on a false statement as well as to examine and analyze the legal consequences arising from a notarial deed based on a false statement.

The study was qualified as a normative law research that departs from a void norma. Hasil showed responsibility in the event of forgery made by the parties in accordance UUJN notary deed and rules Changes in UUJN is when the notary in the exercise of his proven violations the notary is responsible in accordance with the act of doing good in terms of the responsibility of Administrative Law, Civil Law.

Based on the results of the study, it is known that the notary cannot be held criminally responsible for making a deed based on false information from the parties because the secret of the position of a notary that gives birth to the rights and obligations of denial, and cannot fulfill the formulation of the elements of the crime of forgery in Article 266 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. A notary can be held criminally responsible for a deed made by him based on what he saw, witnessed, and experienced in a legal act if intentionally or negligently, the notary made a fake deed to the detriment of other parties. Criminal liability, a notary must meet the following elements: committing a crime; have the ability to take responsibility; intentionally or negligently; and no excuses. The notarial deed made based on false information does not automatically result in the deed being null and void. The parties who are harmed by the existence of such a deed must file a civil lawsuit to the court to cancel the deed. Notary criminal liability needs to be regulated in the upcoming UUJN.

Keywords: *Secret of Notary Position, Criminal Liability, Rights and Obligations of Denial.*